

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 April 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SUB UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI HARIYANTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **745078**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.497.725.000

1. Tanah Seluas 478 m² di TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 95.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m²/330 m² di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 2695 m² di TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 202.125.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m²/175 m² di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 544 m²/154 m² di TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.521.725.000**III. HUTANG** Rp. 195.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.326.725.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.